

IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal

Volume 5, Number 2, Desember 2023. p. 135-150

P-ISSN:2685-953X; e-ISSN:2686-0317

DOI: 10.18326/imej.v5i2.135-150

website: <http://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/imej>

Antara Social Planning dan Locality Development: Integrasi Negara dan Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Banyumas

Asyabudin¹

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri,

Purwokerto

asyab@uinsaizu.ac.id

Imam Alfi²

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri,

Purwokerto

imam@uinsaizu.ac.id

Ageng Widodo³

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri,

Purwokerto

ageng@uinsaizu.ac.id

Abstract

This research aims to provide an overview of how the UEP program's accompanying efforts combine two different community development models to achieve the goal of economic independence for UEP beneficiaries. The method used in this research is field research by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of the research explain that Joint Business Groups (KUBE) in Banyumas Regency can be grouped into two categories, namely KUBE based on community initiative and KUBE as a government program. KUBEs of community will be business groups that are created from the ideas and efforts of the community independently. Meanwhile, KUBE as a government program emerges as a result of social planning and policy. Both Community-initiated KUBE and Government Program KUBE have differences in business planning, funding, membership, assistance and nature.

Keywords : : KUBE;Community Empowerment; Model Integration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana upaya pendamping program UEP memadukan dua model pengembangan masyarakat berbeda untuk mencapai tujuan kemandirian ekonomi penerima manfaat UEP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Banyumas bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu KUBE atas inisiatif masyarakat dan KUBE sebagai program pemerintah. KUBE atas inisiatif masyarakat merupakan kelompok usaha yang secara keseluruhan lahir dari gagasan dan upaya masyarakat secara mandiri. Sedangkan KUBE sebagai program pemerintah muncul dari dalam konteks perencanaan dan kebijakan sosial. Perbedaan antara KUBE atas inisiatif masyarakat dan KUBE program pemerintah adalah pada perencanaan usaha, pendanaan, keanggotaan, pendampingan dan sifat.

Kata kunci: KUBE; Pemberdayaan Masyarakat; Integrasi Model

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghinggapi setiap negara yang ada di dunia. Semua negara di dunia ini bisa dipastikan memiliki satu ciri yang sama, yaitu memiliki masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan (Saugi & Sumarno, 2015). Selain dimensi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai dimensi diantaranya pendidikan, kesehatan dan kesulihan Masyarakat dalam berbagai akses lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami kemiskinan sebagai masalah yang lebih kompleks daripada sekadar keterbatasan ekonomi (Rachmawati, 2011).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial (Sirojjuddin et al., 2022). Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama (Sudarman et al., 2022). Kaum miskin mengalami

keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha. Tawaran kredit UMKM dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh kaum miskin, karena keterbatasan kemampuan dan asset yang dimiliki (Sabran, 2003). Beberapa masalah tersebut terjadi di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak merata di seluruh wilayah. Daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan barat Indonesia (Bakhtiar et al., 2020). Menurut data BPS, pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa sebesar 13,62 juta (8,79%) dan di pulau Sumatera sebanyak 5,67 juta (9,27%). Sedangkan angka kemiskinan di Papua sebesar 26,03%. Selisih angka yang cukup signifikan ini menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antara Jawa dan Papua.

Salah satu alternatif mengurangi kesenjangan dan kemiskinan adalah memberikan akses untuk menciptakan usaha. Negara berusaha menemukan pola yang efektif agar kaum miskin dapat memperoleh akses modal usaha tanpa agunan dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kaum miskin merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah melalui dinas sosial (Putri et al., 2022). Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin atau terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi KUBE-KUBE kaum miskin : bekerjasama dengan PINBUK sejak tahun 2003. Melalui KUBE diharapkan masyarakat miskin dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Identifikasi masalah dalam pengabdian ini adalah jumlah masyarakat miskin cenderung meningkat, peluang usaha yang ada relatif terbatas, belum optimalnya usaha ekonomi produktif dan keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha (Saugi & Sumarno, 2015).

Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan amanat UUD 1945 di atas. Di pasal 1, poin 6, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 2 Tahun 2019, disebutkan

bahwa:

“Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.”

Dalam pasal 2 Permensos tersebut, disebutkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk “penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha”. (Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019). Sebagaimana layaknya bantuan sosial, program bantuan sosial UEP inidiberikan dalam bentuk bantuan uang tunai sebesar Rp. 10 juta kepadakelompok usaha bersama (KUBE) yang telah memenuhi syarat. (Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019, Pasal 1, poin 6).

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah sebuah program penguatan yang dibentuk pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian usaha dan meningkatkan pendapatan pada masyarakat miskin (Zulkarnain et al., 2020). Syarat untuk dapat tergabung dalam KUBE adalah memiliki usaha atau memiliki niat untuk berwirausaha, mampu bertanggung jawab, bersedia mengikuti aturan, berusia produktif, memiliki keterampilan, mempunyai identitas kependudukan, dan tergolong ke dalam kelompok fakir miskin (Afiffah et al., 2022). KUBE direncanakan dapat membantu kelompok miskin dengan tidak hanya diberikan bantuan langsung.

Salah satu manfaat yang dirasakan setelah terbentuknya KUBE adalah peningkatan ekonomi, adanya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan masyarakat yang lebih mandiri terutama yang tergabung dalam kelompok tersebut. Permasalahan yang dihadapi selama berjalannya usaha tersebut ada permasalahan terkait bahan baku yang masih harus membeli dari petanilain, pemasaran yang belum terlalu luas cakupannya dan alat produksi yangmasih sederhana (Putro et al., 2020).

Dilihat dari perspektif model pengembangan masyarakat, program bantuan sosial UEP ini memiliki kesenjangan (untuk tidak mengatakan kontradiksi). Di satu sisi, sesuai nama yang disematkan, bentuk program ini adalah program bantuan sosial, yang merupakan

bagian dari model perencanaan sosial (*social planning*). Ini terlihat dari bagaimana bentuk pelaksanaan program UEP sesuai amanat Permensos No. 2 tahun 2019 di atas, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai sebesar 10 juta (Basuki, 2022).

Namun, di sisi lain, jika melihat tujuannya, program ini sesungguhnya mengharuskan penggunaan model pengembangan masyarakat *locality development*. Ini terlihat di pasal 1 poin 6, bahwa program ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan meningkatkan produktivitas kerja. Kedua tujuan ini, menurut penulis, hanya bisa dicapai dengan menggunakan proses pelatihan usaha yang merupakan metode *locality development*, alih-alih pemberian bantuan uang tunai.

Dalam hal bentuk dan tujuan, kedua model pengembangan masyarakat tersebut sangat berbeda. Model *social planning* dilaksanakan untuk memberisarana “sementara” bagi penerima manfaat untuk tetap menjalani kehidupan dalam taraf hidup layak saat mereka mengalami kemiskinan. Dengan tujuan itu, maka bentuk *social planning* secara umum adalah bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua bentuk tersebut lebih ditujukan untuk tujuan pemulihan (kuratif) dan pencegahan (preventif): agar orang yang jatuh dalam jurang kemiskinan tetap bisa menjalani hidup layak (kuratif) dan tidak jatuh lebih dalam ke dalam jurang tersebut (preventif).

Sementara itu, model *locality development* merupakan model yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi penerima manfaat. Bentuk programnya, pada umumnya, adalah pelatihan keterampilan, sehingga diharapkan penerima manfaat dapat membangun usaha ekonomi secara mandiri. Dalam konteks ini, maka model *locality development* bergerak pada ranah pengembangan (*developmental*). Kedua model ini dilaksanakan di Banyumas. Sekitar 250 KUBE tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Program KUBE sudah berjalan di beberapa kecamatan seperti Baturraden, Tambak, Ajibarang, Banyumas dan di beberapa kecamatan lainnya.

Model pertama KUBE di Banyumas dirikan dan dibangun oleh pemerintah. Sehingga program pemerintah dan peran pendamping sosial menjadi sangat penting. Pemerintah menyiapkan bantuan dana untuk KUBE yang didirikan sebagai implementasi penanganan fakir miskin.

Model kedua adalah adalah KUBE yang diinisiasi masyarakat. Misalnya KUBE Mandiri Sentosa di Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen. Kuswantoro dan Bu Deni adalah inisiatornya. Tulisan ini mengeksplorasi kedua model tersebut dengan melihat hasilnya dalam masyarakat. Dengan perbedaan kedua model, menyebabkan pengelolaan dan pengembangannya akan berbeda.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak diarahkan oleh teori, akan tetapi lebih menggunakan fakta-fakta yang ada atau ditemukan pada saat penelitian di lapangan (*field research*). Oleh karenanya Bogdan & Biklen, S. menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif menggunakan prosedur penelitian yang di dalamnya menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif yakni seperti ucapan, teks/tulisan, serta perilaku orang yang ada di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019).

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dinilai terlibat langsung dalam Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Banyumas. Selain itu penerima dampak dari usaha ini juga dimasukkan dalam subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut dapat adalah sebagai berikut: pertama, kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas. Kedua, Kepala Desa Kalisalak selaku aparat pemerintah desa yang memberikan pembinaan dan pengarahan pada program. Ketiga, Pimpinan/Pengurus KUBE Mandiri Sejahtera Kabupaten Banyumas. Keempat, Tenaga Produksi/peserta KUBE Mandiri Sejahtera Kebasen Kabupaten Banyumas. Kelima, masyarakat calon penerima manfaat dalam hal ini adalah para pembelihasil produksi KUBE mandiri Sejahtera. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Banyumas

Banyumas adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten

Banyumas memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta berbagai potensi ekonomi yang penting bagi daerah tersebut. Kabupaten ini memiliki berbagai potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang dapat memungkinkan adanya berbagai jenis Kelompok Usaha Bersama. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang menjalankan program pengentasan kemiskinan melalui KUBE. Hingga saat ini, terdapat sekitar 250 KUBE yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas program KUBE sudah berjalan di beberapa kecamatan seperti Baturraden, Tambak, Ajibarang, Banyumas dan di beberapa kecamatan lainnya.

Banyumas memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beragam dalam bidang usaha. UMKM adalah bagian penting dari ekonomi lokal, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kube di kabupaten Banyumas mengarah pada pengembangan di beberapa sektor UMKM yang umum di Banyumas dan Indonesia pada umumnya termasuk:

Pertama, pertanian dan perikanan: Banyumas memiliki potensi pertanian dan perikanan yang signifikan. UMKM di sektor ini termasuk petani, peternak, dan nelayan kecil yang beroperasi dalam berbagai aspek pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan. Kedua, kerajinan tangan: UMKM yang terlibat dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan anyaman, keramik, kain tenun, dan produk-produk kerajinan lainnya, juga cukup umum di daerah ini. Ketiga, kuliner: bisnis kuliner, seperti warung makan, catering, dan produksi makanan olahan tradisional, sering menjadi pilihan UMKM di Banyumas. Makanan khas daerah juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Keempat, pengolahan hasil pertanian: UMKM yang terlibat dalam pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan buah-buahan, sayuran, dan bahan pangan lainnya juga memiliki potensi di daerah ini. Kelima, Fashion dan Tekstil: UMKM di bidang fashion dan tekstil, termasuk pembuatan pakaian, aksesoris, dan produk tekstil lainnya, juga bisa ditemukan di Banyumas. Keenam, pariwisata dan Kerajinan Souvenir: Dengan kekayaan budaya dan alamnya, UMKM di sektor pariwisata dan kerajinan souvenir juga memiliki peluang untuk berkembang. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu bentuk organisasi atau kelompok yang terdiri dari beberapa

individu atau anggota yang bekerja sama dalam berbagai kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bersama. KUBE biasanya dibentuk oleh kelompok petani, nelayan, atau usaha kecil lainnya dalam skala lokal atau komunitas yang memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa dalam mengembangkan usaha mereka. Tujuan utama dari pembentukan KUBE adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kolaborasi, pembagian sumber daya, pengembangan usaha, dan pembelajaran bersama. Anggota KUBE bisa berbagi pengetahuan, modal, peralatan, serta bahan baku sehingga mereka dapat mengoptimalkan usaha mereka. Selain itu, KUBE juga dapat memperkuat posisi tawar anggota di pasar, meminimalkan risiko, dan meningkatkan akses terhadap peluang yang lebih besar.

Bagi seluruh anggota KUBE di Banyumas, keuntungan yang diterima diantaranya adalah 1) Pembagian risiko: Anggota KUBE dapat berbagi risiko usaha bersama, sehingga bila salah satu anggota menghadapi kesulitan, yang lain dapat memberikan dukungan. 2) Peningkatan akses: Melalui KUBE, anggota dapat mengakses sumber daya dan peluang yang mungkin tidak dapat mereka capai sendiri. 4) Skala ekonomi: Dengan bekerja bersama, KUBE dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar, yang dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. 5) Pembelajaran Bersama: Anggota KUBE dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengembangkan usaha. 6) Akses ke pendanaan: KUBE dapat lebih menarik bagi lembaga keuangan atau investor karena memiliki kelompok yang lebih besar dan lebih terorganisir.

Proses Pembentukan dan Pengelolaan KUBE di Banyumas

KUBE di Kabupaten Banyumas secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua Model. Pertama KUBE yang didirikan dan dibangun oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan bantuan dana untuk KUBE yang didirikan sebagai implementasi penanganan fakir miskin dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satunya ada di Desa Alasmalang Kec. Kemranjen merupakan KUBE ini bergerak dalam pengolahan biji mlinjo. Saat ini anggota KUBE masih aktif menjalankan usaha bersamanya. Bantuan dari pemerintah fokus pada efektifitas operasional KUBE, peningkatan keterampilan anggota dan pemenuhan sarana prasarana

KUBE.

Berdasarkan informasi dari Binti Khoridah selaku pendamping sosial bahwa tahapan pendirian KUBE model ini dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut sebagai berikut:

Tahap pertama pendamping mendapatkan sosialisasi adanya informasi program pemerintah tentang bantuan modal bagi KUBE. Pendamping sosial diminta untuk menyampaikan dan memfasilitasi warga untuk musyawarah pendirian KUBE. Musyawarah dilaksanakan melalui pertemuan rutin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan rutin ini dilaksanakan setiap bulan dan wajib bagi para KPM. Melalui pertemuan rutin ini pendamping sosial mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pendirian KUBE.

Tahap kedua, warga dengan pendamping musyawarah tentang nama, kepengurusan, dan jenis usaha apa yang akan dipilih. Setelah mendapatkan kesepakatan maka secara formal surat keputusan KUBE diterbitkan oleh Pemerintah Desa setempat. Disini selaku anggota KUBE menjelaskan

“Saya bersama anggota yang lain diajak berdiskusi tentang KUBE. Saya juga diminta untuk mengajak yang lain untuk aktif. Anggota KUBE kemudian mendapat penyuluhan dan pembinaan rutin dari pendamping Sosial.”

Tahap ketiga, setelah resmi KUBE berdiri pendamping sosial kemudian menindaklanjuti program dengan membuat proposal dan kelengkapan administrasi lain. Proposal ini berisi pengajuan dana bantuan modal bagi KUBE yang sudah berdiri. Proposal diajukan melalui rekomendasi pemerintah Desa, kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Menurut Mugi Lestari selaku Pendamping Sosial Kecamatan Sumbang Baturaden menjelaskan

“Setelah proposal di terima oleh Dinsomaperdes Kabupaten (apabila lengkap) dan memenuhi syarat yang ditentukan maka akan ajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.”

Tahap keempat, Setelah melalui proses panjang kemudian Dinas Sosial Propinsi melakukan peninjauan dan verifikasi KUBE. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan KUBE, kepengurusan, Anggota dan sarat administrasi lain. Setelah KUBE diverifikasi dan memenuhi sarat maka akan ditindak lanjuti untuk memperoleh program bantuan sosial

KUBE dari Kementerian Sosial.

Model kedua adalah KUBE yang diinisiasi dan didirikan oleh masyarakat. Misalnya KUBE Mandiri Sentosa di Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. KUBE ini diinisiasi oleh Kuswantoro dan Bu Deni bersama. Kuswantoro merupakan mantan pendamping Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kabupaten Banyumas. Berdasarkan informasi dari Wati salah satu anggota KUBE tersebut menjelaskan.

“Pada awalnya dikumpulkan oleh Bapak Kuswan. Kurang lebih sejumlah tujuh orang yaitu, Slamet Riadi, Dani, Wati dan Sri. Dalam pertemuan tersebut kami diajak bermusyawarah tentang gagasan mendirikan KUBE. KUBE tersebut akan bergerak dalam bidang pemanfaatan limbah kain perca melalui produksi keset. Warga mendapatkan informasi terkait dengan peluang dan tantangan serta kesempatan berwirausaha bersama melalui KUBE tersebut. Kemudian disusunlah pengurus, nama dan legalitas.”

Motivasi masyarakat bergabung dalam KUBE cukup variatif. Misalnya tidak ada pekerjaan, penambahan pemasukan dan hanya sekedar mengisi waktu saja. Saat ini jumlah anggota KUBE ini kurang lebih 30 orang yang tersebar di Desa Kalisalak, Kaliwedi, Tumiyang, Randegan dan di Kecamatan Rawalo seperti Desa Tipar, Menganti dan Losari.

Modal awal disponsori oleh inisiator KUBE yakni bapak Kuswan. Sebagai ketua, dia berusaha mencari peluang dan jaringan untuk mengembangkan KUBE yang telah didirikan. Tahap awal pendirian KUBE ini menjalin kemitraan dengan pengrajin keset dari Kroya Cilacap. Instruktur pertama dalam pembuatan keset adalah pengrajin tersebut. Alat, bahan baku dan cara pembuatannya dari pengrajin Kroya tersebut. Bahkan sampai hasil produknya juga masuk ke situ. Selang waktu beberapa bulan KUBE mengalami kelesuan sebagai dampak atas Virus COVID 19. Bahan Baku yang awalnya disuplai oleh mitra harga naik. Dan akhirnya produksi sempat berhenti.

Tanggal 24 Mei 2022 KUBE Mandiri Sentosa mendapatkan bantuan modal dari pemerintah melalui Program Bimbingan Teknis (Bimtek) UKM (Usaha Kecil Menengah) produk kerajinan kreasi perca di Kabupaten Banyumas. Lokasi kegiatan berada di Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kabupaten Banyumas. Hadir dalam kegiatan tersebut dari Anggota DPR RI Komisi VIII, Dinas pendustrian dan Dinsosmaperdes. Dari kegiatan tersebut KUBE Mandiri Sentosa saat ini telah memiliki sarana prasarana

yang cukup, seperti permodalan, keterampilan anggota dalam membuat produk, alat pres plastik, dan menambah optimisme warga terhadap KUBE ini. Secara umum proses pendampingan yang dilakukan kepada KUBE di Banyumas sebagai berikut:

1) Pendekatan Komunitas

Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi anggota potensial KUBE dalam komunitas setempat. Pendamping mengkomunikasikan ide KUBE kepada Masyarakat serta mengumpulkan minat dan masukan masyarakat. Selain itu, pendamping juga mendiskusikan manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kelompok.

2) Pembentukan Kelompok

Pendamping akan memfasilitasi dalam pembentukan kelompok dengan memilih pengurus, pemimpin kelompok, dan anggota lainnya. Selain itu juga menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Setelah anggota memilih pimpinan kelompok, kemudian dilakukan penyusunan struktur organisasi. Kemudian semua anggota Menyusun pengembangan rencana kerja.

3) Pelatihan dan Kapasitas

Pendamping memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Pelatihan meliputi peningkatan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan aspek teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan.

4) Perencanaan Usaha Bersama

Selama melaksanakan perencanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terdapat berbagai kegiatan yang perlu dilakukan untuk merumuskan rencana kerja seperti: melakukan analisis potensi dan kebutuhan, perencanaan pemasaran dan menentukan teknologi serta peralatan, serta penyusunan jadwal serta pemantauan kinerja.

5) Implementasi Usaha Bersama

Sebelumnya diperlukan penentuan pendanaan untuk memulai atau mengembangkan usaha bersama. Pendanaan bisa berasal dari tabungan anggota, koperasi atau pinjaman kecil, maupun

dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintahan setempat. Pada tahap implementasi anggota KUBE mulai menjalankan usaha bersama sesuai dengan rencana yang telah disusun.

6) Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai langkah kritis dalam memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan harapan anggota.

Komparasi Model Pengembangan dan Opsi Alternatifnya

Sesuai dengan namanya, KUBE atas inisiatif Masyarakat merupakan kelompok usaha yang secara keseluruhan lahir dari gagasan dan Upaya Masyarakat sendiri. Sebaliknya, KUBE sebagai program pemerintah merupakan KUBE yang lahir dan berkembang sebagai program yang dirancang oleh Pemerintah. Inisiatif KUBE kategori kedua ini muncul dari pemerintah dalam konteks perencanaan dan kebijakan sosial. Perbedaan jenis KUBE ini juga menimbulkan perbedaan dalam beberapa unsur, yaitu perencanaan usaha, pendanaan awal, keanggotaan, pendampingan dan kemudian berujung pada penggunaan model yang digunakan oleh pendamping KUBE, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Perencanaan Usaha

Perbedaan perencanaan usaha KUBE berdasarkan inisiatif pembentukannya. KUBE yang didirikan atas inisiatif warga direncanakan secara mandiri dalam hal perencanaan usaha yang kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan pelatihan anggota komunitas. Sedangkan perencanaan untuk KUBE yang merupakan program pemerintah dilakukan oleh pendamping dengan mengikutsertakan partisipasi para anggota yang sudah ditentukan oleh program KUBE tersebut.

2) Pendanaan awal

KUBE atas inisiatif masyarakat didanai secara mandiri oleh masyarakat sebagai modal awal. Sebaliknya, KUBE yang terbentuk sebagai program pemerintah mendapatkan dana awalnya dari bantuan sosial pemerintah. Bantuan sosial dari pemerintah ini memang diberikan khusus untuk pembentukan KUBE, khususnya kepada individu yang terdaftar terdaftar

dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Dengan kata lain, model pendataan dalam bentuk bantuan sosial ini kemudian membatasi siapa saja yang bisa menjadi anggota KUBE dalam kategori ini.

3) Keanggotaan

KUBE yang didirikan atas inisiatif masyarakat tidak membatasi keanggotaannya. Sifat keanggotaan KUBE jenis ini adalah universal, artinya KUBE jenis ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung sebagai anggotanya. Berbeda dengan hal itu, KUBE sebagai program pemerintah merupakan bagian dari program PKH. Sehingga, keanggotaannya adalah selektif, artinya hanya kategori masyarakat yang memenuhi kriteria seperti ketentuan penerima manfaat PKH yang bisa menjadi anggota KUBE.

4) Pendampingan

Pendamping KUBE atas inisiatif masyarakat tidak memiliki pendamping resmi dari pemerintah. Mereka dapat memiliki pendamping dari relawan yang secara sukarela mendampingi mereka. KUBE di Kalisalak melakukan hal ini, di mana didampingi secara sukarela oleh salah satu dosen UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebaliknya, KUBE yang merupakan program pemerintah mendapatkan pendamping resmi yang ditugaskan oleh pemerintah. Tugasnya adalah untuk mendampingi para anggota KUBE dalam mengimplementasikan program KUBE yang direncanakan oleh pemerintah/. Lebih sederhana, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komparasi KUBE inisiatif masyarakat dan Program Pemerintah

Faktor	KUBE Inisiatif Masyarakat	KUBE Program Pemerintah
Model yang digunakan	Model Dasar	Model intregrasi/ kombinasi
Nama Model	<i>Locality Development</i>	<i>Planned Capacity Development</i>

Integrasi Model	Tidak ada integrasi	Integrasi <i>Locality Development</i> dengan <i>Social Planning</i>
Perencanaan Usaha	Masyarakat	Pemerintah (pendamping PKH) Bersama Masyarakat
Pendanaan	Swadaya	Bantuan Sosial
Keanggotaan	Universal	Selektif/ <i>Means-tested</i>
Pendampingan	Pendampingan mandiri/ oleh relawan	Pendampingan oleh pemerintah
Sifat	<i>Bottom-up</i>	<i>Top-down</i>

KUBE di Kalisalak menunjukkan sebuah upaya pengembangan masyarakat menggunakan model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) bertujuan menciptakan dan meningkatkan kompetensi atau kapasitas. *Locality development* berupaya menarik berbagai macam elemen dengan cara mengarahkan kekuatan individu maupun organisasional. Model ini berorientasi kepada proses (*process-oriented*). Artinya, proses peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) serta upaya mendorong partisipasi setiap elemen masyarakat untuk memecahkan problem sosial adalah hal utama (Hardcastle et al., 1996).

Sementara itu, KUBE yang menjadi bagian dari program PKH pemerintah menggunakan model kombinasi peningkatan kapasitas terencana (*Planned Capacity Development*), yang merupakan integrasi antara model dasar *locality development* dan *social planning*. Akan tetapi, fakta bahwa program KUBE sebagai program pemerintah ini diinisiasi oleh pemerintah, melalui pendamping PKH, didanai dengan bantuan sosial dan keanggotaannya bersifat selektif, menunjukkan bahwa terdapat unsur perencanaan atau kebijakan sosial di dalam program tersebut.

Model ini merujuk pada konsep bahwa peran perencana sosial sebagai seorang ahli (*expert*) dapat menuntun masyarakat untuk melakukan perubahan sosial dengan membuat naskah kebijakan (*policy paper*). Langkah ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan penanganan masalah sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah *draft* (Netting et al., 2016).

Berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan KUBE dari dua

model yang ada di Banyumas, beberapa hal perlu ditekankan dalam proses pemberdayaan melalui KUBE ini dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah: Pertama, hambatan komunikasi yang merupakan bagian sangat vital dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan alat sosialisasi yang menegaskan posisi manusia sebagai makhluk sosial (Widodo & Siswanto, 2019). Kegiatan pendamping sosial didominasi oleh proses komunikasi sehingga potensi terjadinya hambatan komunikasi sangat tinggi. Hambatan komunikasi dalam proses pendampingan sosial dapat berasal dari pendamping karena minimnya pemahaman pendamping tentang fokus kegiatan maupun penerima manfaat karena rendahnya kesadaran penerima manfaat terhadap urgensi kegiatan pendampingan.

Kedua, keberlanjutan (*sustainable*) program pemberdayaan masyarakat untuk memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat (Alifah & Widodo, 2021). Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat mampu mengelola potensinya sendiri tanpa harus bergantung pada pihak luar misalnya pemerintah dan perusahaan. Setelah dilakukan proses *assessment* diketahui bahwa desa arenan memiliki potensi tanaman kelapa yang banyak tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, subjek pemberdayaan adalah petani kelapa perlu dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dibidang pangan menjadi isu strategis untuk dikembangkan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan keberlanjutan program dalam KUBE pemerintah atau KUBE inisiatif, keduanya memiliki tantangan yang relatif sama. KUBE pemerintah rentan berhenti apabila *support system* tidak berjalan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang tangguh sehingga memiliki kemandirian dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi masalah kemiskinan di tingkat lokal. Ketergantungan pada program pemerintah menjadi unsur utama keberlangsungan program. Sebaliknya bagi KUBE inisiatif yang tidak memiliki sumberdaya dan dukungan pemerintah memungkinkan untuk lebih terbuka menemukan sumberdaya. Namun KUBE inisiatif harus memiliki modal kuat karena sejak awal didirikan akan melewati masa krisis baik sumberdaya anggota, permodalan atau yang lain. Hal ini memberikan daya *survivability* bagi KUBE inisiatif.

Kesimpulan

Perbedaan antara KUBE inisiatif masyarakat dan KUBE program pemerintah di Banyumas dapat dilihat dari integrasi model, perencanaan model, pendanaan, keanggotaan, perencanaan usaha dan sifat di mana KUBE inisiatif masyarakat bersifat *bottom up* sementara KUBE program pemerintah bersifat *top down*. KUBE atas inisiatif masyarakat merupakan kelompok usaha yang secara keseluruhan lahir dari gagasan dan upaya masyarakat sendiri. KUBE dalam kategori ini bisa dilihat pada kasus KUBE Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. KUBE sebagai program pemerintah merupakan KUBE yang lahir dan berkembang sebagai program yang dirancang oleh pemerintah. Inisiatif KUBE kategori kedua ini muncul dari pemerintah dalam konteks perencanaan dan kebijakan sosial. Perencanaan dan kebijakan sosial untuk peningkatan ekonomi Masyarakat ini tertuang di dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diimplementasikan oleh pendamping program PKH.

Daftar Pustaka

- Afiffah, S. R., Fortuna, O. D., Kusumah, T. M., & Fauzi, A. (2022). Penerapan Strategi Digital Marketing Model AIDA dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cakrawala, Rawalumbu, Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 623–630. <https://doi.org/10.54082/jamsi.286>
- Alifah, N., & Widodo, A. (2021). Upaya Pemberdayaan Petani Gula Semut Melalui Sertifikasi Organik Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 252–262. <https://doi.org/10.24235/empower.v6i2.9041>
- Bakhtiar, R., Anshar, S., Zumiarti, Z., Fitri, A., & Prayitno, R. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam. *UNES Law Review*, 2(4), 383–391. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.128>
- Basuki, P. (2022). Implementasi Kebijakan Program Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE Di Desa Citarik Palabuhanratu Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.4>
- Hardcastle, D. A., Powers, P. R., & Wenocur, S. (1996). *Community Practice: Theories and Skills for Social Workers*. Oxford University Press.
- Netting, F. E., Kettner, P. M., McMurtry, S. L., & Thomas, M. L. (2016). *Social Work Macro Practice* (6th ed.). Pearson.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat

Cendekia.

- Putri, V., Rokan, M. K., & Nasution, J. (2022). Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan Umkm Di Lkms Bmt KUBE Sejahtera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 67–72.
- Putro, B. N., Saiman, S., & Sihidi, I. T. (2020). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3). <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4210>
- Rachmawati, N. (2011). BUDAYA KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA (Studi Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru). *Jurnal Industri Dan Perkotaan*, 15(27), 1–14.
- Sabran, M. S. (2003). Model Pembangunan Komuniti. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 11(2), 135–145.
- Saugi, W., & Sumarno. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226–238.
- Sirojuddin, Mullah, F., Aryadinantan, Y., Widodo, T., Waras, & Salim, M. (2022). Peningkatan Skala Usaha Mandiri Melalui “Bang Leo” Di Panti Asuhan Muhammadiyah Aimas Kab. Sorong Papua Barat. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 125–129.
- Sudarman, S. W., Dewi, T. A., & Zein, S. (2022). Pelatihan Budidaya Magot Sebagai Alternative Pakan Ternak Di Desa Banjar Rejo Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.24127/sss.v6i2.2181>
- Widodo, A., & Siswanto, S. (2019). Pembinaan Anak Jalanan Melalui Pola Asuh di Rumah Singgah dan Belajar (RSB) Diponegoro Sleman Yogyakarta. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-05>
- Zulkarnain, T. A., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2020). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(1), 10–17.